

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Tujuan utamanya adalah membantu manajer korporasi untuk mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan dilingkungan perusahaan mereka serta menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*-nya.

Lebih lanjut lagi menurut Helena dan Therése (2005) masyarakat merupakan *stakeholder* terpenting bagi perusahaan dan media memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas perusahaan kepada para *stakeholder*. Media juga memiliki kekuatan untuk membeberkan informasi perusahaan, apabila perusahaan melakukan tindakan yang tidak pantas, maka media akan membeberkan keburukan perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* untuk menjaga reputasi dihadapan *stakeholder*-nya.

2. Organisasi Nirlaba

Organisasi *non-profit* atau organisasi nirlaba didefinisikan sebagai organisasi yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan tidak bertujuan untuk memperoleh laba (*profit*), adapun surplus yang diperoleh dari kegiatan tersebut kembali digunakan untuk tujuan pencapaian misi organisasi (Connolly dan Kelly, 2011).

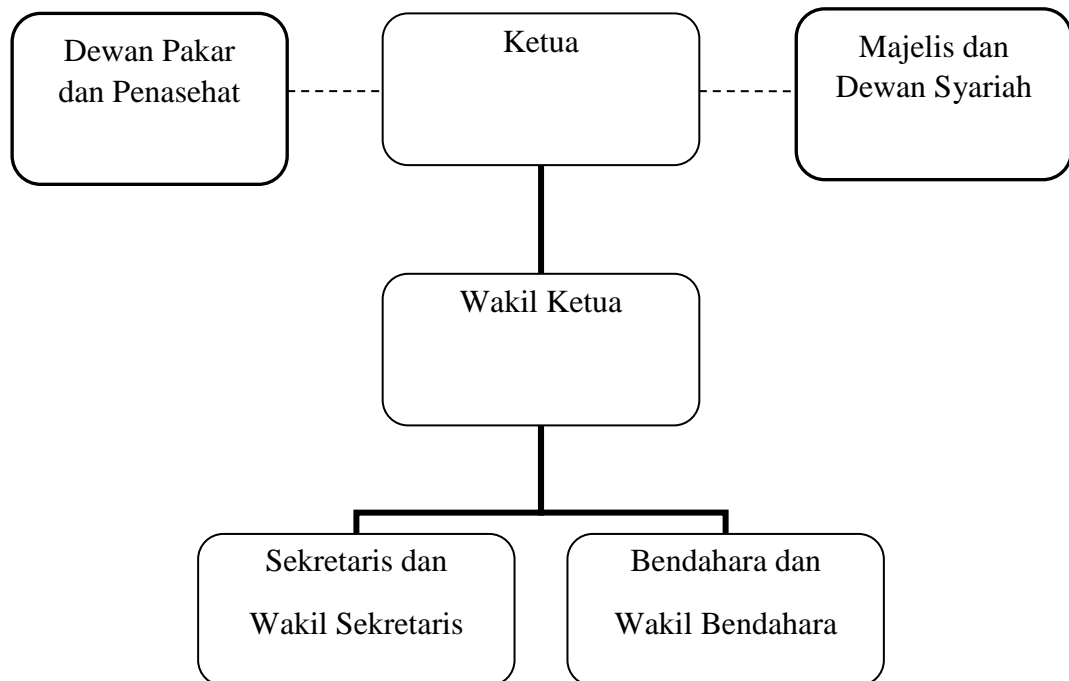
Karakter dan tujuan dari organisasi nirlaba menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi nirlaba berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia (Komang, 2008). Organisasi nirlaba juga dapat didefinisikan secara hukum sebagai organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset atau pendapatannya untuk kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau pemimpinya.

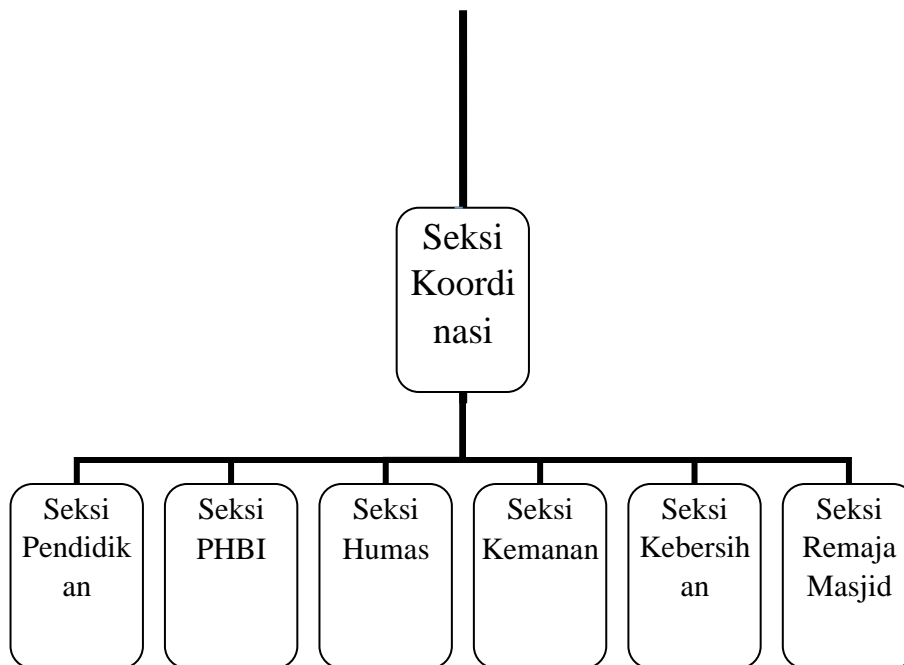
3. Masjid sebagai Organisasi Nirlaba

Masjid merupakan salah satu organisasi *non-profit* atau nirlaba, sehingga bentuk laporan arus kas maupun laporan keuangannya harus mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) No. 45. Dalam PSAK No. 45 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada yayasan yang berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga mengatur

bagaimana model pencatatan dan pelaporannya (Rizky, 2013). Pada praktiknya dilapangan masih belum terealisasi, kebanyakan Masjid masih menggunakan metode pencatatan sederhana dan manual. Tetapi bentuk laporan keuangan yang dihasilkan sudah dapat menjadi gambaran pengelolaan dana pada Masjid tersebut.

Struktur organisasi Masjid berlangsung selama 3 tahun (1 periode). Pembentukan pengurus Masjid dilakukan dengan rapat bersama semua pengurus. Selain tugas utama dari masing-masing divisi pada struktur organisasi yang telah ditetapkan, dibentuk pula badan pengawasan serta badan koordinasi terhadap Paguyuban Masjid, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim, Remaja Masjid Islam dan kepanitiaan pengurus-pengurus Masjid. Adapun salah satu contoh struktur organisasi pada Masjid seperti berikut:





Gambar 2.1
Struktur Organisasi Masjid

Berikut adalah tugas masing-masing divisi pada struktur organisasi Masjid:

a. Dewan Penasehat

Memberikan masukan, arahan serta saran kepada semua pengurus agar roda organisasi dan program kerja berjalan dengan baik sejalan dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan.

b. Ketua Umum

Bertanggung jawab penuh atas jalannya organisasi dan mengontrol seluruh program kerja dan mengevaluasi semua program kerja serta kegiatan yang dilaksanakan.

c. Wakil Ketua

Membantu Ketua Umum untuk mengontrol seluruh organisasi dan program kerja pengurus agar berjalan dengan baik, terutama di bidang dakwah, pendidikan dan peribadatan.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Bertanggung jawab atas administrasi kesekretariaan pengurus, menyusun serta mencatat notulen rapat dan ikut membantu membuat laporan keuangan Bendahara.

e. Bendahara dan Wakil Bendahara

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang serta menerima, menyimpan dan membukukan keuangan Masjid.

f. Seksi Koordinasi

Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan ibadah dan program-program yang sedang berjalan seperti mengontrol pelaksanaan.

g. Seksi Pendidikan

Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan pendidikan serta dakwa yang dilakukan secara teknis. Seperti mengelola majelis taklim atau pengajian dan TPA.

h. Seksi PHBI

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' dan Mi'raj, pelaksanaan qurban Idul Adha, dll.

i. Seksi Humas

Bertanggung jawab untuk sosialisasi dan publikasi atas jalannya organisasi dan program-program kerja Masjid serta membuat dokumentasi setiap kegiatan.

j. Seksi Keamanan

Bertanggung jawab menjaga dan memelihara fasilitas serta perlengkapan Masjid.

k. Seksi Kebersihan

Bertanggung jawab atas kebersihan Masjid dan sarana pendukung lainnya seperti toilet, tempat wudhu, dll.

l. Seksi Remaja Masjid

Bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak dan remaja di lingkungan Masjid dengan melakukan kegiatan serta program kerja yang bermanfaat.

4. Praktik Manajemen Keuangan

Menurut Bambang (2005) manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Sedangkan menurut Darsono (2006), aktivitas dalam manajemen keuangan meliputi:

a. Aktivitas Pembiayaan (*Financing Activity*)

Aktivitas pembiayaan ialah kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal untuk membiayai kegiatan bisnis.

b. Aktivitas Investasi (*Investment Activity*)

Aktivitas Investasi ialah kegiatan penggunaan dana berdasar pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dan risiko yang sekecil-kecilnya.

c. Aktivitas Bisnis (*Business Activity*)

Aktivitas bisnis ialah kegiatan untuk mencari laba melalui efektivitas penjualan barang atau jasa dan efisiensi biaya yang akan melahirkan laba.

Dalam pandangan agama Islam, segala pekerjaan harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam yang sesuai dengan unsur-unsur manajemen (Mulyono, 2010).

Manajemen keuangan bukan hanya seputar pencatatan akuntansi. Tetapi merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan orang keuangan (Subagio, 2010). Jadi, manajemen keuangan pada Masjid yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak

langsung untuk menunjang penyelenggaraan aktifitas atau kegiatan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

5. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian dalam arti sempit disamakan dengan *internal check* yang merupakan prosedur mekanis dan secara otomatis dapat saling memeriksa ketelitian dan pencatatan data akuntansi yang dilakukan oleh suatu bagian dengan hasil-hasil pencatatan lainnya. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang terkoordinasi yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Zaki, 1990).

Menurut Mulyadi (2001) suatu perusahaan atau organisasi akan memiliki pengendalian internal yang baik, bila didalamnya terdapat ciri atau karakteristik yang baik atau memuaskan. Antara lain adalah:

- a. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya.
- c. Praktik-praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Menurut Mulyadi (2001) untuk memenuhi tujuan-tujuan sistem pengendalian intern harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi yang baik adalah yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - 1) Harus ada pemisahan antara fungsi-fungsi operasi, penyimpanan dan akuntansi.
 - 2) Tidak ada satupun unit organisasi (bagian) yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semua tahap atau transaksi.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi terlaksananya setiap transaksi (Mulyadi, 2011).
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi. Beberapa unsur untuk menciptakan praktik yang sehat:
 - 1) Struktur organisasi yang baik.
 - 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai.
 - 3) Harus didukung oleh praktik yang sehat sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Mutu pegawai mempengaruhi sukses tidaknya suatu pengendalian intern,

karena bagaimanapun baiknya struktur organisasi serta wewenang dan prosedur-prosedur, tetapi mutu pegawainya tidak memenuhi syarat yang diinginkan, sulit diharapkan bahwa SPI akan berhasil dengan baik.

- e. Pengawasan Tambahan, untuk menjamin sistem pengendalian intern yang baik, selain terpenuhinya keempat ciri-ciri diatas, diperlukan beberapa pengawasan tambahan yang terdiri dari laporan, budget / standar dan suatu staf audit intern.

6. Kegiatan Pengumpulan Dana

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, perhimpunan dan pengarahan (Burhan, 2013). Masjid lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh.

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Didin, 1998). Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan (Amiruddin, 2005).

b. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah *syari'at*, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada

nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Sanusi, 2009).

c. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “*shadaqa*” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Didin, 1998).

Dari pengertian diatas secara garis besar, dana shadaqoh, infaq dan zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif. Sedangkan, kegiatan produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi para *mustahik*.

7. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas atau organisasi tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi (Tantriani, 2010). Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Menurut Harahap (2012) laporan keuangan pada dasarnya harus memiliki kualitas informasi atau karakteristik kualitatif agar dapat memberikan informasi yang berkualitas tinggi bagi para pemakainya seperti:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat Dibandingkan

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

B. Penurunan Hipotesis

1. *Praktik Manajemen Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan*

Dalam ilmu manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Sutrisno (2003) tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana mengelola perusahaan, baik untuk mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana guna mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Atiek, dkk. (2010) menemukan bahwa kemampuan manajemen, ilmu akuntansi, pelatihan, akuntansi, sumber daya manusia, pengalaman di bidang akuntansi, SPI, TI, integritas, kesinambungan, budaya organisasi dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Bayumas. Penelitian serupa dilakukan oleh Zaenal (2008) yang menemukan bahwa manajemen keuangan, resiko perusahaan dan informasi teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

Penelitian Jamaliah, dkk. (2013) menemukan bahwa pengurus, komite Masjid berhak ikut serta dalam mendiskusikan strategi manajemen keuangan Masjid. Dimana nantinya akan berdampak pada kuantitas dan kualitas laporan keuangan serta pengelolaan keuangan yang efektif. Manajemen keuangan memiliki fungsi yang sangat vital disamping fungsi manajemen yang lainnya, karena manajemen keuangan berkaitan dengan bagaimana perusahaan mencari dana dan mengelola dana tersebut agar dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan organisasi atau perusahaan.

Praktik manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktifitas atau termasuk di dalam kegiatan keuangan organisasi. Logikanya, semakin tinggi praktik manajemen keuangan organisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola semakin baik kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Merujuk pada teori, logika dan hasil penelitian sebelumnya, maka penurunan hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif antara Praktik Manajemen Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan.

2. Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Penelitian yang dilakukan oleh Tuti (2014) mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan mengungkapkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian serupa dilakukan oleh Anggraeni, dkk. (2011) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Menurut Jamaliah, dkk. (2013) tujuan dari dilaksanakannya sistem pengendalian intern adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari salah saji, untuk patuh terhadap perundang-undangan dan untuk menjaga aset organisasi. Dengan adanya kontrol dari pihak intern yang kuat di dalam organisasi Masjid, maka dapat mengurangi segala bentuk penyimpangan terutama penyalahgunaan dana yang masuk berupa infaq, sodakoh maupun zakat, sehingga dana menjadi aman. Pengelolaan dana merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius dari organisasi Masjid dan masyarakat.

Pada penelitian Jamaliah, dkk. (2013) mengungkapkan selain pengurus, komite Masjid berhak ikut serta dalam pengendalian internal yang efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan Masjid yang pastinya berdampak terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam

pengelolaan dana akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya.

Maka, penurunan hipotesisnya ialah:

H₂: Terdapat pengaruh positif antara Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan.

3. Kegiatan Pengumpulan Dana dan Kualitas Laporan Keuangan

Hal utama yang perlu diperhatikan yang mendasar dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang dimiliki, disimpan atau diinvestasikan (Binti, 2011). Catatan penting adalah penghimpunan dana secara kolektif akan menghasilkan dana dalam jumlah besar, sehingga pendistribusiannya dapat direncanakan dan diatur untuk program jangka panjang yang bersifat produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Binti (2011) menemukan bahwa implementasi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Implementasi Pengelolaan Keuangan maka semakin tinggi pula tingkat kualitas laporan keuangan. Serupa dengan penelitian Jamaliah, dkk. (2013) yang menemukan hasil positif dari kegiatan pengumpulan dana. Selanjutnya, Masjid perlu menyadari pentingnya penggalangan dana. Keterlibatan aktif anggota komite Masjid dalam kegiatan pengumpulan dana memfasilitasi aliran dana yang berkelanjutan ke Masjid.

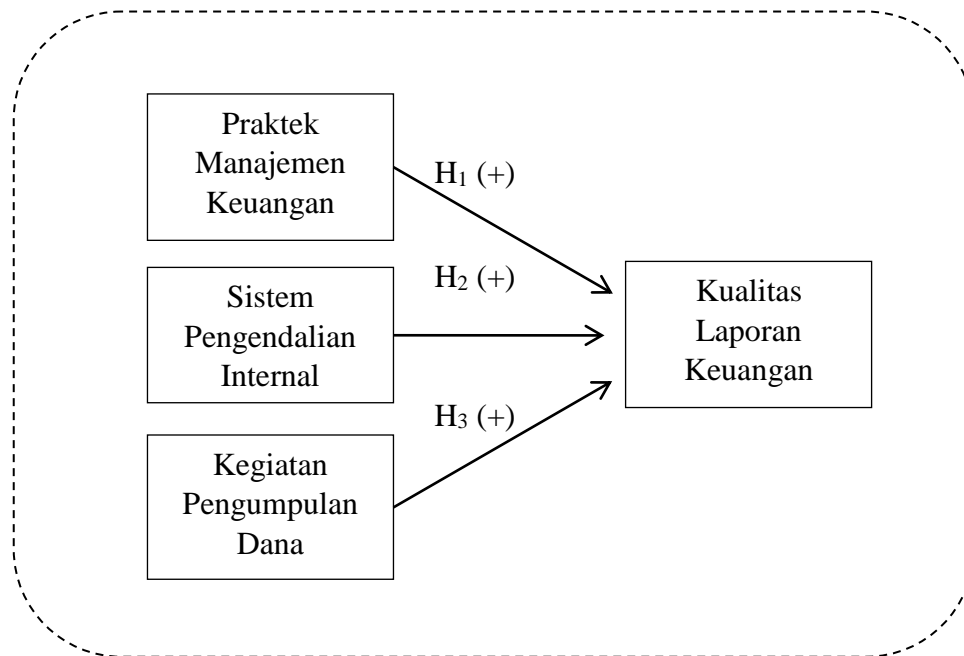
Menurut (Burhan, 2013) tujuan dari pelaporan pengumpulan dana adalah untuk pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara

tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Dari teori, logika dan hasil penelitian sebelumnya, maka, bentuk hipotesisnya ialah:

H₃: Terdapat pengaruh positif antara Kegiatan Pengumpulan Dana dan Kualitas Laporan Keuangan.

C. Model Penelitian

Adapun model dari penelitian yang akan dilakukan ialah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Model Penelitian